KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perbaikan Citra Butuh Kesadaran Untuk Berubah
Tanggal : Rabu, 27 Oktober 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sebagian anggota DPR yang hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Berdasarkan survei Litbang *Kompas* yang dilakukan pada Oktober 2021, kinerja anggota DPR dinilai belum memuaskan sehingga membuat citra DPR belum juga membaik.

Perbaikan Citra Butuh Kesadaran untuk Berubah

Mengubah persepsi publik butuh kesadaran anggota DPR mengubah dirinya masing-masing terlebih dahulu untuk meningkatkan kinerja. Tanpa kesadaran diri, perubahan itu tak berarti.

JAKARTA, KOMPAS — Publik masih mempersepsikan DPR dengan citra buruk dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Hal ini menuntut kesadaran semua anggota DPR untuk mengubah diri masing-masing guna meningkatkan kinerjanya. Tanpa perubahan diri dalam kerja pengawasan, penganggaran, dan pembuatan legislasi, citra buruk DPR secara institusi dan pribadi akan terus melekat di benak publik.

Survei Litbang *Kompas*, Oktober 2021, menunjukkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mendapatkan citra paling baik di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Sebanyak 93 persen responden mempersepsikan TNI bercitra baik. Di posisi kedua ada Polri yang angkanya sama dengan pemerintah daerah (pemda), yaitu dengan persepsi baik dari 77 persen responden.

Berikutnya Mahkamah Konstitusi (73 persen), Mahkamah Agung (73 persen), kejaksaan (71 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (69 persen), DPD (63 persen), DPR (55 persen), dan partai politik (55 persen). Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Agil Oktaryal, mengatakan, citra DPR yang belum menggembirakan banyak dipengaruhi oleh penilaian terhadap kinerja DPR secara umum. Publik melihat kinerja anggota DPR dalam pengawasan, penganggaran, dan legislasi belum memuaskan. Hal itu membuat citra lembaga terbawa.

"Kalau dilihat secara jernih, masih rendahnya citra DPR ini karena fungsi pengawasan belum maksimal dijalankan oleh anggota DPR, terutama saat pandemi. Di bidang penganggaran, misalnya, praktis DPR menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada pemerintah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020," ujar Agil, Selasa (26/10/2021).

Dalam bidang legislasi, kata Agil, rendahnya capaian legislasi yang disahkan dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020 dan 2021 menunjukkan kinerja DPR belum optimal. Dengan kondisi itu, daftar prolegnas yang diusung tiap tahunnya tetap saja banyak.

Kecenderungan rendahnya citra DPR itu mengulang hasil survei Litbang *Kompas* sebelumnya, yang juga menempatkan DPR dan parpol sebagai lembaga negara bercitra buruk. TNI, kepolisian, kejaksaan, MK, MA, dan KPK relatif stabil meskipun ada sedikit penurunan dalam citra baik pada KPK.

Bahan instrospeksi

Menyikapi masih rendahnya citra lembaga perwakilan ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berbagai usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menekan citra negatif di masyarakat. Karena itu, anggota DPR akan terus introspeksi dan membangun kepercayaan masyarakat.

"Kalau ada masukan dari masyarakat dan kami juga sering mengadvokasi buruh, ojek *online*, korban asuransi, bahkan LSM yang sering memberikan kami kritik, kami terima menjadi masukan," ujarnya.

Menurut Dasco, masyarakat bisa memberikan laporan langsung lewat situs web ataupun media sosial untuk kemudian dilakukan rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan masyarakat. Bahkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR berencana membangun tempat khusus untuk menyampaikan aspirasi ataupun berunjuk rasa. "Namun, karena pandemi Covid-19, hal itu belum direalisasikan," ujarnya.

Fraksi-fraksi di DPR pun menyadari kecenderungan citra buruk DPR ini. Sebagai institusi yang sifatnya kolektif kolegial dan terdiri atas berbagai fraksi-fraksi yang merepresentasikan warna politik masing-masing, perbaikan citra lembaga menjadi tugas anggota bersama semua fraksi tanpa terkecuali.

Optimalisasi fungsi

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan, DPR telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta menyelesaikan persoalan bangsa, baik melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. Di bidang legislasi, misalnya, ada dua terobosan besar di masa pandemi ini, yaitu pengesahan Perppu No 1/2020 menjadi UU No 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, dan UU Cipta Kerja.

Dua undang-undang itu menjawab kebutuhan publik akan percepatan penanganan dampak pandemi. Dengan UU No 2/2020, pemerintah bisa leluasa melakukan *refocusing* anggaran untuk optimalnya penanggulangan pandemi serta dampaknya. Demikian juga UU Cipta Kerja yang ingin memudahkan arus investasi masuk, sebagai respons pemulihan ekonomi.

"Kalau citra DPR masih buruk, dan belum memuaskan, itu jadi tugas semua pihak di DPR untuk memastikan DPR lembaga yang fungsional. Kalaupun ada yang belum puas, DPR tentu tak bisa memuaskan semua pihak," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay mengatakan, hasil survei menjadi referensi penting perbaikan kinerja DPR. Semua elemen di DPR mulai dari anggota hingga pegawai kesekretariatan mesti berbenah memperbaiki diri.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, hasil survei menjadi introspeksi bagi anggota DPR. Anggota Komisi III DPR yang juga Juru Bicara Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengatakan, kerja DPR tak bisa instan seperti eksekutif. Banyak kebijakan baru terasa manfaatnya setelah beberapa waktu diputuskan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta mengatakan, rendahnya citra DPR dipengaruhi karakter DPR sebagai lembaga politik yang melibatkan pemungutan suara.

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi berpendapat, menurunnya citra DPR merupakan hal yang wajar karena persepsi publik kadang naik dan turun. (REK/SYA)

▶ klik.kompas.id/polhuk
Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.